



## ANALISIS PETA KONFLIK PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

Hidayatullah, Umar, Hartati Sulisty Rini, Thriwaty Aarsal.

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2016  
Disetujui Mei 2016  
Dipublikasikan Juni 2016

### Keywords:

*Analysis, Development,  
Conflict Map, PT. Semen  
Indonesia*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta konflik serta dinamika konflik yang terjadi dalam proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Teori kelas Karl Marx serta pemetaan konflik Fisher digunakan untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi pembangunan pabrik sekaligus lahan eksploitasi yang akan digunakan PT. Semen Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, antara lain; PT. Semen Indonesia, Pemerintah, LBH Semarang, JM-PPK, Walhi, kelompok masyarakat pendukung, dan kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik. Konflik menyebabkan kehancuran hubungan sosial masyarakat sekaligus persatuan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran perlunya kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia dan mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.

### Abstract

*This study aims to determine map of conflict and conflict dynamics that occur in the development process of the PT. Semen Indonesia in Gunem District of Rembang. Karl Marx's theory of class and Fisher's conflict mapping used to analyze the focus of study in this research. The method used in this study is a qualitative research method. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The validity of research data obtained through triangulation data. The data analysis was conducted in several stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The results showed that each part has a different opinion in addressing the plant development at once land of exploitation that will be used by PT. Semen Indonesia. The parties involved in the conflict, among others; PT. Semen Indonesia, Government, LBH Semarang, JM-KDP, Walhi, supporting community groups, and repellent community groups of the plant development. Conflict led to the destruction of social relations once the union groups that have the same interests. Based on this research, the writer can suggest the need for studies of the various disciplines related to the construction of the PT. Semen Indonesia and encourages the parties to the dispute to find a way out to resolve the conflict.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang berada di jalur Pantai Utara pulau Jawa. Kabupaten Rembang memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sektor pertanian Kabupaten Rembang adalah sektor yang menjadi tumpuan daerah ini. Keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Rembang kini memiliki ancaman yang nyata dengan hadirnya beberapa usaha tambang yang memanfaatkan kars. Kars adalah perbukitan khas yang dibentuk oleh batugamping (Geomagz, 2015: 18). Keberadaan kars yang terdapat di Rembang merupakan batuan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Salah satu daerah Kabupaten Rembang yang memiliki potensi tambang kars adalah kawasan Watuputih yang berada di Kecamatan Gunem. Kawasan Watuputih merupakan kawasan kars yang masuk dalam jajaran pegunungan Kendeng Utara.

Besarnya permintaan pasar terhadap semen setiap tahunnya berimplikasi pada naiknya kebutuhan bahan baku semen. Keadaan tersebut membuat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN yang memproduksi berbagai jenis semen memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan penambangan batuan kars. Kebutuhan akan bahan baku membuat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berminat untuk melakukan penambangan bahan baku semen di kawasan Watuputih. Selain kars unsur lain yang juga menjadi obyek tambang yang dilakukan Semen Indonesia di Kabupaten Gunem adalah batugamping dan juga tanah liat.

Masuknya PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait tata kelola pemanfaatan lahan serta pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ) menjadi pijakan melakukan kegiatan penambangan di kawasan Pegunungan Kendeng, khususnya kawasan cekungan Watuputih yang masuk wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem. Tanggapan yang munculpun beragam, mulai dari mendukung maupun menolak pembangunan pabrik.

Pihak yang kontra dengan pembangunan pabrik melakukan serangkaian penolakan termasuk dengan menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi pembangunan pabrik tersebut, sehingga menyebabkan munculnya konflik yang berkepanjangan.

Selain masyarakat lokal, pemerintah, PT. Semen Indonesia, terdapat pula lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga turut berkonflik dalam pembangunan pabrik Semen Indonesia. Serangkaian kegiatan dilakukan oleh pihak yang berseteru untuk mengusahakan tercapainya keinginan pribadi masing-masing. Masyarakat baik pendukung maupun penolak pembangunan pabrik, LSM, pemerintah serta PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi dalam pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Berbagai aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang saling bergesekan sehingga menimbulkan konflik berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta konflik pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan dinamika konflik dalam pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Penulis menggunakan metode pemetaan konflik Fisher guna memperoleh gambaran mengenai peta konflik di seputar pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia. Sedangkan teori konflik kelas Karl Marx digunakan penulis untuk menganalisis konflik yang terjadi.

Beberapa penelitian konflik sebelumnya sudah pernah dilaksanakan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan Ma'arif (2014) dengan judul Gerakan Perlawanan LSM Cagar Tuban terhadap Pembangunan PT. Holcim Indonesia. Penelitian tersebut menekankan kajiannya pada gerakan perlawanan LSM Cagar Tuban menghadapi rencana pembangunan PT. Holcim Indonesia. Gerakan yang dilakukan LSM Cagar Tuban merupakan manifestasi kepemimpinan organik serta respon akan hegemoni yang dilakukan pabrik untuk menaklukkan masyarakat.

Penelitian terkait konflik tambang juga pernah dilakukan oleh Preston (1995) dengan judul penelitian *The Politics of Ecology : Dredge-Mining in South Africa*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sejarah, peran serta hubungan pihak yang saling berkonflik memperebutkan sumber daya alam di pantai St Lucia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan

gan menyikapi sumber daya alam di pantai ST. Lucia . Terdapat tiga kelompok yang berbeda yaitu, kelompok peduli lingkungan, kelompok penambang dan kelompok kulit hitam, yang masing-masing berkonflik untuk mewujudkan keinginannya. Tujuan masing-masing kelompok mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengarahkannya kepada keuntungan kelompoknya. Pemerintah berada dalam posisi sulit, disatu sisi ketika pemerintah menolak aktifitas tambang, pemerintah akan dianggap tidak berpihak terhadap keseimbangan lingkungan. Akan tetapi, disisi lain ketika pemerintah menolak aktifitas tambang pemerintah akan kehilangan pemasukan negara yang utama.

Risalatul, dkk (2014) dengan judul Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik tanah, akan tetapi konflik lingkungan. Pihak yang berkonflik terbagi menjadi dua yaitu pihak pro terhadap tambang dan pihak yang kontra dengan kegiatan pertambangan. Pihak yang pro terhadap tambang terdiri dari masyarakat pro tambang, PT. Antam dan pemerintah. Pihak yang kontra terhadap tambang terdiri dari masyarakat kontra tambang serta berbagai pihak pemerhati lingkungan. Pihak pertama, mengusung kepentingan ekonomi, sedangkan pihak kedua mengusung kepentingan lingkungan. Penolakan akan kegiatan pertambangan diperlihatkan dengan sejumlah aksi demonstrasi serta membuat surat penolakan kegiatan tambang. Perjuangan masyarakat kontra juga sampai ke lembaga peradilan, diawali adanya empat warga Desa Wotgalih yang kontra tambang dianggap telah melakukan tindakan pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau pengeroyokan, hingga terjadilah perselisihan atas rencana pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih.

Selain itu, kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih memberikan dampak terhadap lingkungan tambang, baik dampak lingkungan sosial maupun fisik. Dampak fisik yang muncul akibat pertambang pertama tahun 1998 adalah adanya lubang besar yang ditinggalkan setelah proses pertambangan. Dampak fisik lain yang timbul adalah rusaknya jalan serta abrasi pantai. Dari segi sosial, adanya rencana memperpanjang izin pertambangan oleh PT. Antam dan didukung oleh pemerintah menimbulkan konflik secara vertikal maupun horisontal dalam masyarakat.

Berbagai penelitian yang sebelumnya telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan penulis belum pernah dilaksanakan. Selain itu, penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan digunakan penulis untuk perbandingan

maupun masukan dalam melakukan penulisan penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang digambarkan melalui kata-kata. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian, penulis melakukan penelitian langsung serta tinggal bersama masyarakat yang terlibat dalam persoalan konflik PT Semen Indonesia. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di dua desa dari 16 desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Kedua desa tersebut adalah Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan. Pemilihan kedua lokasi penelitian tersebut didasarkan pada intensitas konflik yang tinggi di kedua desa yang saling berdekatan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang dipilih oleh penulis adalah model triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian meliputi beberapa tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia

Untuk melihat peta konflik pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu; kemunculan embrio penolakan, pertemuan dengan pihak luar dan penolakan masyarakat. Ketiga hal tersebut menuntun para pembaca untuk mengetahui secara runtut kronologis konflik yang tengah terjadi, sehingga pada akhirnya pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peta konflik pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia

Kemunculan embrio penolakan dapat dimulai dari kedatangan Bibit Waluyo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada bulan Februari 2013. Kunjungan Gubernur bersama dengan Bupati sejatinya merupakan prosesi penyiapan lahan yang disertai juga dengan pagelaran wayang kulit. Akan tetapi, dalam kesempatan itu belum ada penjelasan yang lengkap mengenai kabar akan didirikannya pabrik Semen Indonesia. Ketidaktahuan warga terjadi karena yang terlibat aktif dalam acara tersebut hanya sebagian tokoh masyarakat saja, sedangkan masyarakat secara umum hanya menjadi pe-

nonton acara tanpa mengerti maksud dan tujuan terselenggaranya acara yang diselenggarakan.

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, Adi (34th) mengetahui sedari awal rencana pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia. Adi merupakan salah satu orang yang mengetahui rencana pembangunan pabrik serta lahan eksploitasi batuan kars di wilayah Tegaldowo. Adi selaku warga Tegaldowo sudah mengetahui maksud dan tujuan kunjungan PT. Semen Indonesia dan pihak pemerintah ke wilayah Kecamatan Gunem, khususnya saat melakukan pagelaran wayang di Desa Tegaldowo. Adi sendiri dalam konflik yang sampai saat ini masih terjadi memiliki peran untuk mengajak masyarakat secara luas untuk menerima kehadiran PT. Semen Indonesia di wilayah Kecamatan Gunem. Selain mengajak masyarakat untuk menerima kehadiran PT. Semen Indonesia, Adi juga berperan sebagai organisator masyarakat pendukung pembangunan PT. Semen Indonesia.

Beberapa minggu pasca pagelaran wayang kulit yang diprakarsai oleh PT. Semen Indonesia, delapan warga Tegaldowo, yaitu Joko Prianto, Sumarno, Abdullah, Supriyanto, Parmin, Rusman, Joko, Zanjuli, dan Nardi mendatangi rumah kepala desa yang pada saat itu masih dijabat oleh Suyanto guna menanyakan tentang kebenaran kabar rencana pembangunan pabrik Semen Indonesia. Kedatangan para warga dikarenakan semakin banyaknya desas-desus kedatangan PT. Semen Indonesia untuk melakukan penambangan. Namun, ketidakpuasan muncul dalam pertemuan beberapa warga dengan kepala desa. Ketidakpuasan bertambah ketika masyarakat mendapatkan jawaban yang sama saat menanyakan pada Camat Gunem.

Setelah kedatangan beberapa warga ke kantor Kecamatan Gunem itulah embrio penolakan terhadap pembangunan pabrik mulai terbentuk. Anggota awal adalah beberapa warga yang meminta kejelasan dengan Kepala Desa dan Camat Gunem. Lalu anggota bertambah menjadi 14-17 orang. Bertambahnya anggota disebabkan 8 orang yang awalnya menanyakan perihal kejelasan di kantor Kecamatan Gunem melakukan pembicaraan dengan warga lainnya, terutama yang berprofesi sebagai petani. Pembicaraan tersebut akhirnya mendapatkan sambutan dari warga lainnya yang sependapat.

Warga yang mulai ingin melakukan penolakan pembangunan pabrik tidak serta merta langsung menyuarakan pendapatnya. Berbagai pertemuan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan dilakukan malam hari di tengah persawahan warga. Langkah tersebut ditem-

puh karena terdapat kekhawatiran dibenak para warga yang akan dicap sebagai pemberontak maupun melawan ketentuan negara.

Ketakutan beberapa warga yang mulai tidak sepakat dengan pembangunan pabrik bukan tanpa alasan. Merujuk Geertz (1992:76) yang mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa cenderung bersifat sinkretis, dimana kaidah-kaidah sosial cenderung toleran, hidup berdampingan dengan mendapatkan tempat yang layak. Akan tetapi dalam kasus ini, budaya desa yang biasanya lebih mengutamakan musyawarah mufakat serta menghasilkan keputusan yang bulat ternyata tidak terjadi ketika menghadapi permasalahan tentang pembangunan pabrik semen. Perbedaan pendapat mulai muncul di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat di dalam kultur pedesaan yang kental bisa jadi merupakan sesuatu yang dianggap aneh atau menyimpang. Maka dari itu keberanian untuk menyuarakan pendapat yang berbeda tidak serta merta muncul di tengah masyarakat.

Apalagi yang dihadapi adalah proyek besar yang dilakukan perusahaan milik negara.

Sebelum muncul penolakan, awalnya warga hanya ingin meminta kejelasan informasi tentang pembangunan pabrik beserta eksploitasi batuan kapur yang kabarnya akan dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Kejelasan yang diminta warga diperlukan guna mengetahui secara pasti rencana aktifitas tambang di wilayah Kecamatan Gunem, mengingat aktifitas tambang yang sebelumnya sudah ada memunculkan dampak yang cukup memperhatikan. Dalam hal ini, permintaan kelengkapan informasi disebabkan oleh kekhawatiran warga akan semakin rusaknya lingkungan hidup karena aktifitas tambang. Dalam fase ini kekhawatiran hanya dilandasi oleh pengalaman sehari-hari masyarakat dengan melihat kenyataan yang mereka alami tanpa disertai dengan argumen ilmiah.

Pada tanggal 22 April 2013 warga kembali menanyakan rencana pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia kepada pemerintah desa dalam pertemuan Karang Taruna di Balai Desa Tegaldowo. Perangkat desa yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan masih belum mengetahui rencana pembangunan pabrik Semen Indonesia. Sehari sebelum pertemuan di balai desa dilakukan, salah satu orang warga dari desa Tegaldowo diancam akan diculik. Ancaman akan adanya penculikan itu berasal dari beberapa orang yang mendukung pembangunan pabrik, preman, aparat keamanan, serta beberapa perangkat pemerintahan desa. Ancaman yang ditujukan kepada warga itu berupa larangan untuk

ikut bergabung kepada kelompok yang berulang kali menanyakan tentang kejelasan keberadaan PT. Semen Indonesia.

Satu bulan kemudian, puluhan warga Desa Tegaldowo melakukan unjuk rasa dengan berjalan kaki menuju balai Desa Tegaldowo sambil menyuarkan penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen. Unjuk rasa ini menjadi momen awal masyarakat secara tegas menolak rencana pembangunan pabrik Semen Indonesia dan berani menyuarkan aspirasinya berupa penolakan terhadap PT. Semen Indonesia di depan umum. Saat tiba di kantor Balai Desa Tegaldowo, adu mulut sempat terjadi antara kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik dengan pihak keamanan dan pemerintah desa. Unjuk rasa yang dilakukan warga bertepatan dengan acara silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan masyarakat desa Tegaldowo. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh pihak PT. Semen Indonesia.

Namun dalam kesempatan itu kelompok masyarakat penolak pabrik merasa tidak dihargai suaranya karena di tengah tuntutan meminta kejelasan justru pihak pemerintah serta pihak PT. Semen Indonesia mengintruksikan warga untuk mempercepat serta melancarkan pembangunan pabrik. Menurut kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik, hal itu menjadi sesuatu yang keanehan tersendiri. Ketidaksepehaman yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat tidak terlalu ditanggapi secara serius. Justru sebaliknya, pihak perusahaan mengintruksikan percepatan pembangunan kepada masyarakat setempat.

Penundaan proses pembangunanpun tidak ada disaat penolakan masih tetap berjalan. Kekerasan juga harus di terima warga pada kesempatan itu. Sumarno, Supristianto, Sunardi, dan Sujito adalah empat warga yang sempat disekap di kantor balai desa serta mendapatkan intimidasi beberapa orang yang ada di balai desa. Keributan akhirnya mereda setelah beberapa saat kemudian empat orang warga yang sempat disekap dibebaskan kembali. Pasca penyekapan yang terjadi di balai desa, ketegangan yang diakibatkan perbedaan pendapat terkait kedatangan PT. Semen Indonesia semakin terlihat jelas di dalam masyarakat.

Sesaat setelah kejadian di balai desa para warga mengalami kebingungan mengenai rencana yang akan dilakukan, padahal sebagian warga yakin bahwa nantinya kedatangan PT. Semen Indonesia akan menyusahkan masyarakat dimasa yang akan datang. Keadaan tersebut membuat warga mencari informasi di luar wilayah Keca-

matan Gunem. Kabar mengenai kemenangan tuntutan masyarakat Sukolilo di PTUN beberapa tahun lalu membuat warga berinisiatif untuk mencari informasi kepada warga Sukolilo yang terlebih dahulu mendapatkan permasalahan dari perusahaan yang serupa.

Pertemuan dengan warga Kecamatan Sukolilo menandai mulai bekerjasamanya masyarakat Rembang yang menolak pembangunan Semen Indonesia dengan pihak luar, yang dalam hal ini diawali dengan menjalin hubungan bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Sejak pertemuannya dengan JM-PPK para warga yang tadinya hanya berbekal pengalaman tentang dampak tambang yang sudah lama ada di wilayah mereka kini berbekal juga pengetahuan ilmiah yang didapatkannya melalui pertemuan-pertemuan dengan pihak luar. Perkenalan dengan JM-PPK diikuti juga perkenalan warga dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Perkenalan ini bisa terjadi karena sebelumnya LBH Semarang membantu masyarakat Sukolilo yang tengah bersengketa dengan PT. Gresik yang kini berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia. Peran lembaga hukum dalam hal ini adalah memberikan bantuan hukum serta pendampingan terhadap masyarakat penolak pembangunan pabrik.

Konflik yang terjadi juga melibatkan Walhi. Keterlibatan Walhi dalam konflik antara masyarakat penolak pembangunan pabrik dengan PT. Semen Indonesia adalah ketika Walhi bersama masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Gunem dan Sale mengajukan gugatan terhadap surat keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Walhi bersama dengan masyarakat berusaha membatalkan usaha pembangunan pabrik serta eksploitasi bahan baku pembuatan semen.

Pasca pertemuan dengan berbagai pihak luar, gerakan kelompok masyarakat menolak pembangunan pabrik semakin solid. Posisi penolakan masyarakat memiliki alasan yang kuat setelah mendapatkan berbagai pengetahuan dari pihak luar. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi semakin memanas. Konflik yang terjadi di Kecamatan Gunem merupakan konflik yang dilatarbelakangi berbagai persoalan di dalamnya. Fisher dkk (dalam Kinseng 2014: 12) mengatakan bahwa konflik adalah hubungan antar dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Persoalan

konflik di seputar pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng Utara tidak sesederhana apa yang dilihat masyarakat pada umumnya. Seringkali persoalan konflik di area pertambangan maupun konflik yang berhadapan dengan pihak negara dan pemilik modal hanya direduksi menjadi persoalan ganti rugi maupun persoalan tanah semata. Menurut temuan penulis setidaknya ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab meletusnya konflik yang hingga kini masih berlangsung antara masyarakat lokal dengan pemerintah maupun dengan PT. Semen Indonesia. Diantara persoalan tersebut, persoalan tentang tanah, keterbukaan dalam pembuatan izin lokasi serta persoalan lingkungan termasuk didalamnya tentang ketersediaan cadangan air untuk kehidupan sehari-hari menjadi persoalan utama yang melatarbelakangi terjadinya konflik.

Masyarakat Tegaldowo dan Timbrangan yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani membuat kebutuhan akan air serta keadaan alam yang baik menjadi syarat mutlak untuk menjalankan usahanya di sektor pertanian. Akan tetapi, munculnya PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang akan melakukan aktifitas pertambangan batuan kars di wilayah Kecamatan Gunem membuat masyarakat menjadi resah. Batuan kars memiliki fungsi menjaga keseimbangan air di wilayah Kecamatan Gunem. Pengalaman buruk akan dampak aktifitas tambang sebelumnya serta pertemuan dengan pihak luar membuat masyarakat semakin sadar akan kepentingannya dan berusaha menolak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia.

Penolakan masyarakat terhadap tambang juga disertai dengan usaha-usaha tertentu, salah satunya melakukan perbandingan keuntungan ekonomi. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara keuntungan dari sektor pertanian yang dibandingkan dengan pendapatan maupun keuntungan yang dijanjikan oleh pihak Semen Indonesia. Kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik menganggap kehidupan sehari-hari sudah dapat ditopang oleh penjualan hasil pertanian, seperti yang diungkapkan oleh Joko Prianto (32 Tahun) sebagai berikut.

“Tanah kami memang kering mas tapi sangat subur jika ditanami, selain itu hasilnya pun melimpah. Hasil dari pertanian kamu sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami. Jadi janji-janji kesejahteraan seperti apa yang akan diberikan Semen Indonesia maupun pemerintah pada kami. Padahal kami sudah sejahtera.” (Wawancara Joko Prianto, 21 Maret 2015).

Dalam kurun waktu satu tahun masyarakat

kat Tegaldowo maupun Timbrangan dapat memanen hasil pertaniannya hingga tiga kali, tentu dengan jenis tanaman yang berbeda. Semua itu tergantung pada musim yang sedang berlangsung, semisal musim penghujan masyarakat menanam padi, sedangkan ketika musim kemarau masyarakat menanam ladangnya dengan tanaman jenis lainnya yang tidak banyak memerlukan air seperti jagung maupun tembakau.

Dari model menanam yang berganti-ganti masyarakat mendapat banyak keuntungan. Sebagai contoh jagung, tanah seluas setengah hektar dalam kurun waktu 4 bulan dapat menghasilkan 7-8 ton jagung, jika dirupiahkan berkisar antara 8-9 juta. Bahkan ketiga hasil panen bagus petani bisa mendapatkan 11 juta rupiah dari hasil pertanian mereka. Seperti yang dikatakan penulis sebelumnya, masyarakat penolak pembangunan pabrik membandingkannya dengan pendapatan dari hasil bekerja di PT. Semen Indonesia, rata-rata masyarakat mendapatkan penghasilan 60 ribu rupiah dari bekerja sebagai kuli bangunan di pabrik Semen Indonesia. Jika dikalikan dalam kurun waktu selama 4 bulan, maka akan muncul jumlah 5,2 juta rupiah. Masyarakat yang penolak pembangunan pabrik beranggapan hasil pertanian jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sektor industri pertambangan. Hal tersebut belum ditambah dengan resiko dampak lingkungan yang akan terjadi dikemudian hari.

Pihak perusahaan memiliki pendapat lain mengenai kehadirannya di Kabupaten Rembang. Berbagai program dilaksanakan di Kecamatan Gunem, mulai dari jalan sehat, membuat koperasi simpan pinjam, meningkatkan usaha kecil menengah, memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur desa dll. Selain itu, dengan kehadiran PT. Semen Indonesia juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dekat pabrik maupun lokasi penambangan. PT. Semen Indonesia beranggapan dengan kedatangannya berikut program yang dilaksanakannya kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat.

Pegunungan Kendeng Utara seperti pegunungan kapur lainnya memiliki banyak potensi yang tidak terlalu diketahui maupun dioptimalkan keberadaannya seperti, potensi ekowisata, penelitian, maupun sebagai sistem energi air yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, pada umumnya potensi pegunungan kars hanya dipandang sebagai potensi untuk aktifitas pertambangan. Aktifitas pertambangan seolah dikedepankan sekaligus mengesampingkan potensi lainnya. Hal tersebut bisa dipahami karena keuntungan dari aktifitas tambang dapat langsung dilihat sebera-

pa besar keuntungannya, berbeda dengan potensi lainnya yang tidak menghasilkan keuntungan secara langsung. Keberadaan PT. Semen Indonesia di Rembang juga dikarenakan pandangan bahwa Pegunungan Kendeng memiliki potensi yang besar untuk bahan baku industri semen.

Ketertarikan PT. Semen Indonesia disebabkan sumber bahan baku yang melimpah di wilayah Pegunungan Kendeng serta kepentingan untuk memperluas pasar. Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang dimana-mana, berusaha dimana-mana, mengadakan hubungan dimana-mana (Marx dan Engels, 2015: 33). Perluasan pasar adalah sebuah kebutuhan yang pasti dalam sebuah mekanisme sistem kapitalis yang dijalankan oleh kaum borjuis.

Perluasan akan pasar industri tambang seringkali membuat gesekan antar beberapa pihak. Hal tersebut juga tercermin dari penelitian Risalatul dkk (2014) yang melakukan penelitiannya di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan PT. Antam bersama dengan pemerintah setempat melakukan aktifitas pertambangan yang secara keras ditentang oleh masyarakat. Menurut penulis, secara garis besar terdapat pola yang hampir sama dalam konflik-konflik yang dilatarbelakangi oleh persoalan tambang. Kepentingan perluasan pasar perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pemerintah, berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal.

Dalam konteks konflik antara masyarakat dan PT. Semen Indonesia, jika dilihat secara sepiantas memang sama-sama mencari keuntungan dari keberadaan Pegunungan Kendeng. Akan tetapi jika melihat persoalan ini lebih dalam maka akan terlihat jelas bahwa keduanya memiliki perbedaan kepentingan yang mendasar. Perbedaan tersebut menjadi lebih jelas ketika kita melihat pada apa yang dianggap Marx sebagai "titik tolak modal": Sirkulasi komoditas (Marx dalam Ritzer, 2012: 98). Pihak PT. Semen Indonesia sebagai kelas borjuis memiliki orientasi menghasilkan keuntungan dari keberadaan pegunungan kendeng utara yang akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen.

Lebih lanjut, keuntungan yang dihasilkan oleh pihak PT. Semen Indonesia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerjanya, namun juga untuk mengembangkan serta mendapatkan jumlah uang yang lebih banyak dari usaha produksi. Inilah yang disebut Marx sebagai sirkulasi khas kapital: Uang (Money) > Komoditas (Commodities) > (dengan jumlah yang lebih besar) Uang (M1-C-M2) (Ritzer, 2012: 98-99). In-

vestasi sebesar Rp 3, 717 triliun yang ditanamkan di Kabupaten Rembang digunakan untuk membangun pabrik serta sarana penunjang lainnya. Diprediksi pabrik berkapasitas 3 juta ton tersebut mendapatkan keuntungan besar setiap tahunnya.

Berbeda dengan PT. Semen Indonesia, keuntungan yang didapatkan oleh para petani dari keberadaan Pegunungan Kendeng Utara adalah tentang keberadaan airnya yang menjadi pemasok kebutuhan kehidupan sehari-hari dan sektor pertanian. Marx menyebutkannya sebagai bukan khas kapital: Komoditas > Uang (Money) > Komoditas (Commodities) (C1-M-C2) (Ritzer, 2012: 99). Keberadaan air digunakan dalam proses pengolahan tanaman, yang setelah beberapa bulan hasil pertanian dapat panen untuk selanjutnya dijual ke pihak lain. Uang yang dihasilkan dari penjualan hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

Selain perbedaan dalam model sirkulasi modal, perbedaan juga terletak pada pemanfaatan Pegunungan Kendeng Utara sebagai syarat produksi. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat Potensi Pegunungan Kendeng Utara. Disatu sisi, masyarakat melihat potensi yang dimiliki Pegunungan Kendeng sebagai penyedia air bagi kelangsungan sektor pertanian maupun kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, disisi lain PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara memiliki pandangan yang berbeda. PT. Semen Indonesia memandang bahwa batuan kars yang banyak terkandung di Pegunungan Kendeng Utara merupakan pasokan yang besar untuk bahan baku pembuatan semen.

Sumber-sumber materil yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia bersifat langka sehingga hubungan-hubungan antara kelas-kelas yang berbeda itu menjadi kompetitif dan antagonistik. (Paul, 1986:131). Hubungan antagonistik atau permusuhan yang dilandasi oleh perebutan sumber materil memang terlihat jelas di konflik pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia. Mengacu pada pemikiran Marx, bahwa faktor penggerak sebuah masyarakat terletak pada kondisi meterial atau kegiatan ekonomi. Dimensi ekonomi inilah yang mendasari perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan terjadi karena terdapat gesekan antara kelas-kelas yang berbeda di dalam sebuah sistem sosial masyarakat.

Konflik antara PT. Semen Indonesia dengan kelompok masyarakat penolak sesungguhnya memperlihatkan sebuah pertentangan perebutan sumber materil. Sumber yang dimaksud

tidak lain adalah Pegunungan Kendeng. PT. Semen Indonesia sebagai kelas dominan menginginkan Pegunungan Kendeng sebagai penyuplai kebutuhan akan bahan baku semen. Disisi lain, kelompok masyarakat penolak menginginkan Pegunungan Kendeng sebagai sistem pendukung tata pengairan sektor pertanian masyarakat.

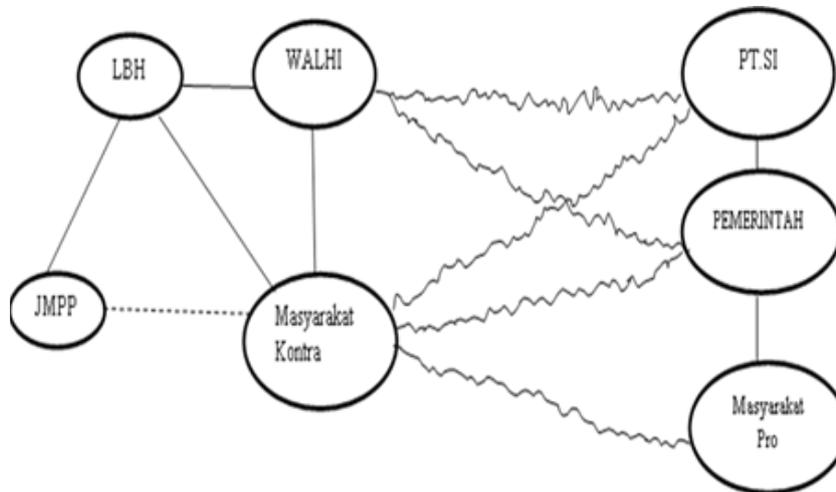
Sektor pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kini bersinggungan dengan kepentingan PT. Semen Indonesia untuk menjalankan industri di bidang produksi semen. Perebutan sumber materi ini pada akhirnya memunculkan perlawanan sebagian masyarakat yang merasa terancam oleh aktifitas pertambangan. Gesekan perbedaan kepentingan kelas membuat masing-masing kelas mempertahankan kepentingannya masing-masing. Berbagai upaya dilakukan kedua belah pihak untuk memenangkan kepentingan kelasnya.

Sama halnya dengan pihak PT. Semen Indonesia, pemerintahpun menganggap kehadiran PT. Semen Indonesia akan meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Bibit Waluyo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah berpendapat bahwa kehadiran investasi yang

besar dari PT. Semen Indonesia diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang ditanam di Kabupaten Rembang.

Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara kelompok masyarakat penolak dengan PT. Semen Indonesia maupun pemerintah. Akan tetapi perbedaan pandangan dan kepentingan juga terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Gunem sendiri, khususnya Desa Tegaldowo dan Timbrangan yang menjadi wilayah penelitian penulis. Sebagian masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani menginginkan pabrik semen batal berdiri dengan alasan akan terganggunya usaha pertanian yang menjadi tumpuan hidup mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat menginginkan pabrik semen dengan harapan mendapatkan pekerjaan dari pihak PT. Semen Indonesia. Kelompok masyarakat pendukung pembangunan pabrik beranggapan bahwa pertanian tidaklah menjanjikan. Dari uraian di atas dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah; Pemerintah, PT. Semen Indonesia, JM-PPK, LBH Semarang, masyarakat pendukung serta masyarakat penolak pembangunan pabrik.

**Bagan 1.** Peta Konflik



Sumber: Data Penelitian

### **Dinamika Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia**

Jika dilihat secara garis besar, konflik pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem mempertontonkan dua kelompok besar yang berbeda pandangan dalam menyikapi pembangunan pabrik. Dua kelompok yang berbeda pandangan itu adalah kelompok yang setuju dengan pembangunan pabrik dan kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan pabrik. Rangkaian peristiwa yang terjadi selama konflik adalah benturan dari masing-masing pihak yang mempertahankan pandangannya terhadap pembangunan pabrik sekaligus eksploitasi batuan kars. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah bentuk ekspresi berbagai pihak menyikapi situasi konflik yang tengah berlangsung. Menurut temuan penulis, terdapat beberapa peristiwa di area konflik yang perlu diperhatikan. Adapun peristiwa itu, meliputi; kekerasan dalam konflik, tendensi perlawanan, perubahan hubungan sosial masyarakat serta aksi unjuk rasa di berbagai tempat.

Praktik kekerasan mewarnai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Semen Indonesia. Beberapa peristiwa kekerasan dan intimidasi dialami oleh warga yang menolak pembangunan pabrik. Tanggal 27 November 2014 para aparat membubarkan paksa masyarakat penolak pembangunan semen di tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Tidak hanya TNI dan Polri, sekumpulan preman juga turut melakukan intimidasi guna membubarkan warga yang bersikeras untuk membuat blokade terhadap truk yang akan masuk kedalam lokasi pembangunan pabrik.

Dalam berbagai kesempatan masyarakat penolak pembangunan pabrik mendapatkan kekerasan fisik dari berbagai pihak termasuk para aparat. Menurut Marx, kekuasaan negara modern hanyalah komite yang mengatur urusan-urusan bersama seluruh borjuis (Marx dan Engels, 2015: 32). Artinya bahwa keberadaan negara sekaligus aparatusnya merupakan lembaga yang melindungi kepentingan-kepentingan kaum pemilik modal. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat adalah upaya menghindari terganggunya proses pembangunan pabrik yang tengah berlangsung.

Hubungan antara PT. Semen Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Rembang memang tidak dapat dihindarkan dalam proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di wilayah Kabupaten Rembang. Pihak PT. Semen Indonesia membutuhkan perluasan pasar untuk ekspansi industri semen di negara Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara yang dapat dipenuhi oleh ketersediaan bahan baku di

Kecamatan Gunem. Sementara di pihak Pemerintah Kabupaten Rembang membutuhkan tambahan pemasukan daerah lewat sektor tambang. Hubungan ketergantungan antara keduanya membuat sebuah sistem untuk mempertahankan kepentingannya.

Sementara hubungan yang terjalin antara negara dan PT. Semen Indonesia dengan kelompok penolak pembangunan pabrik merupakan hubungan yang antagonistik. Hubungan keduanya bukan terletak pada hubungan ketergantungan melainkan hubungan yang bertolak belakang dalam memandang pemanfaatan Pegunungan Kendeng. Jadi dapat dipahami ketika negara lewat aparatusnya melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik. Tindakan yang dilakukan oleh negara maupun PT. Semen Indonesia sejatinya merupakan dampak dari sistem kapitalisme. Marx tidak menyalahkan para anggota individual kaum borjuis untuk tindakan mereka; dia melihat tindakan itu sebagian besar ditentukan oleh logika sistem kapitalis (Ritzer, 2012: 105). Logika kapitalisme mengharuskan masing-masing pihak yang ada dalam sistem untuk saling memperjuangkan kepentingannya.

Keterlibatan preman dalam beberapa peristiwa konflik yang terjadi juga dapat dianalisis dengan pemikiran Marx tentang kelas. Marx (dalam Mulyanto, 2011) menggolongkan preman kedalam sebuah kelas, yang disebutnya sebagai lumpenproletar. Lumpenproletar mencakup jembel, luntang-lantung, preman, penjahat, dan semua orang yang terdepak dari hubungan produksi yang ada di masyarakat. Kelas ini terbentuk dari konsekuensi akumulasi dan ekspansi kapital. Selain itu, lumpenproletar bersifat reaksioner, artinya ketika kelas ini dibeli oleh borjuis, secara otomatis lumpenproletar akan berjalan sesuai dengan arahan borjuis yang membelinya.

Lumpenproletar adalah senjata ampuh borjuis memukul perjuangan proletar (Mulyanto, 2011:110). Kehadiran preman dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Gunem bertujuan membuat teror guna melunturkan semangat para masyarakat yang menolak pembangunan pabrik. Praktik teror dan kekerasan yang dilakukan oleh preman dirasakan oleh masyarakat penolak pembangunan pabrik saat awal mereka melakukan perlawanan. Akan tetapi, praktik seperti itu lama kelamaan tidak lagi dipakai oleh pihak PT. Semen Indonesia untuk membendung penolakan yang dilakukan masyarakat. Upaya menundukkan masyarakat lewat jalur kekerasan dan teror yang dilakukan preman nyatanya tidak berhasil menyurutkan masyarakat untuk menolak keha-

diran Semen Indonesia. Masyarakat sampai saat ini masih bersikeras untuk menolak segala usaha pertambangan yang diproyeksikan akan merusak tata lingkungan masyarakat setempat.

Serangkaian aksi dilakukan oleh kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik tidak lain adalah usaha menjaga kelangsungan hidup dari sektor pertanian yang ditopang oleh keadaan alam yang baik. Salah satunya aksi yang dilakukan kelompok masyarakat penolak yaitu dengan mendirikan tenda di dekat pintu masuk pabrik Semen Indonesia. Pendirian tenda dilakukan pasca aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan yang dilakukan para aparat di tapak pabrik pendirian PT. Semen Indonesia pada siang hari tanggal 16 Juni 2014.

Masyarakat yang menolak pembangunan pabrik secara spontan membuat tenda di sekitar tapak pabrik pada malam harinya. Pembuatan tenda yang dilakukan kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik merupakan respon dari ketidaksepakatan masyarakat terhadap keberadaan pabrik PT. Semen Indonesia. Pengaduan pada perangkat desa maupun pemerintah kabupaten yang tidak ditanggapi sebagaimana harapan masyarakat membuat masyarakat berinisiatif untuk langsung membuat tenda di sekitar pabrik.



**Gambar 1** . Ibu-ibu saat berada di depan tenda perlawanan

Masyarakat yang berada di tenda mayoritas merupakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani. Perempuan punya andil besar dalam usaha penolakan melalui tenda yang dibangun di depan lokasi pabrik. Budaya patriarki yang begitu kental di masyarakat Jawa seringkali memberikan label bahwa kaum perempuan merupakan makhluk yang lemah seolah runtuh ketika melihat persoalan konflik yang terjadi di Kecamatan Gunem. Kaum hawa justru menjadi salah satu ujung tombak dalam serangkaian usaha menentang dominasi kapital.

Konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat menyikapi pembangunan pabrik Semen Indonesia di wilayah Kecamatan Gunem membawa efek yang besar dalam kehidupan ma-

sarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Tegaldowo dan Timbrangan. Berbagai perubahan terjadi terutama pada pola hubungan sosial antara masyarakat pendukung dan penolak pembangunan pabrik. Salah satu bentuk nyata perubahan ini terlihat ketika salah satu masyarakat baik pendukung maupun penolak pembangunan pabrik menyelenggarakan acara atau yang lebih dikenal dengan sebutan hajatan.

Hajatan bagi masyarakat Jawa merupakan sebuah perayaan yang menandai perpindahan dari satu masa ke masa yang lain. Sebelum kehadiran PT Semen Indonesia jika ada salah satu anggota masyarakat yang menyelenggarakan hajatan maka seluruh masyarakat yang merasa mengenalnya akan turut hadir dalam acara tersebut. Begitupula sang penyelenggara acara akan mengundang seluruh warga masyarakat setempat. Akan tetapi pasca kehadiran PT Semen Indonesia keadaan menjadi berubah. Masyarakat yang mendukung pembangunan pabrik akan enggan untuk hadir maupun mengundang dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh kelompok yang menolak pembangunan pabrik, begitupun sebaliknya. Suparman (55 Tahun) mengungkapkan sebagai berikut.

“... Kan ada orang kontra bikin hajatan terus ada tetangganya yang pro, lha orang itu (kelompok pro) enggak diajak, kalo ada syukuran atau hajatan enggak pernah diundang”. (Wawancara 25 April 2015).

Selain itu, hancurnya hubungan sosial juga terlihat dari banyaknya poster yang ditempel di rumah-rumah warga. Poster yang ditempel merupakan wujud dari penolakan maupun dukungan terhadap keberadaan pabrik. Kendati konflik memiliki sifat yang merusak, akan tetapi disisi lain konflik juga memiliki sifat pemersatu pada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan nasib. Menurut Marx pelaku-pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas (Suseno, 1999: 112). Artinya bahwa perubahan sosial tidak terjadi karena tindakan individu, akan tetapi sebuah kelompok yang memiliki tujuan ataupun kepentingan yang sama. Fenomena konflik di Rembang menyebabkan persatuan yang bertumpu pada kesamaan pandangan dalam menyikapi kedatangan PT. Semen Indonesia. Masyarakat penolak maupun pendukung masing-masing menggalang kekuatan untuk dapat memenangkan kepentingannya. Kedua belah pihak seringkali melakukan perkumpulan guna membahas perkembangan konflik yang tengah terjadi.

## SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi pembangunan pabrik sekaligus lahan eksploitasi yang akan digunakan PT. Semen Indonesia. Beberapa pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi, antara lain; PT. Semen Indonesia, Pemerintah, LBH Semarang, JM-PPK, Walhi, serta kelompok masyarakat yang terpecah menjadi dua kelompok yaitu, kelompok masyarakat pendukung pembangunan pabrik dan kelompok masyarakat penolak pembangunan pabrik. Konflik sejatinya dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing pihak untuk mempertahankan dimensi ekonominya. Selain itu, Konflik yang terjadi membuat dinamika sosial juga terjadi di masyarakat Tegaldowo dan Timbrangan. Konflik di satu sisi menyebabkan kehancuran hubungan sosial masyarakat. Akan tetapi di sisi yang lain konflik juga menyebabkan persatuan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama.

Menurut penulis, kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem sangat perlu dilakukan. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya konflik antar pihak. Selain itu, mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan jalan keluar sebagai upaya menyelesaikan konflik.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Geomagz. 2015. Kawasan Kars Sebagai Sistem Energi. Vol.5. 01. Maret. Hal.18
- Geertz, Clifford. 1992. Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius.
- Kinseng, Rilus A. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ma'arif, M Ridho dan Ali Imron. 2014. Gerakan Perlawanan LSM Cagar Tuban terhadap Pembangunan PT. Holcim Indonesia. Dalam Paradigma. Vol.2. No. 1
- Marx, Karl dan Engels F. 2015. Manifesto Partai Komunis. Bandung: Ultimus
- Mulyanto, Dede. 2011. Antropologi Marx. Bandung: Ultimus
- Muryanti, dkk. 2013. Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan. Bantul: Kreasi Wacana.
- Paul, Doyle J. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia
- Preston, A.Robert, 1995. The Politics of Ecology : Dredge-Mining in South Africa. Dalam Environmental Conservation. Vol.22. 02. Hal 151-156
- Risalatul, dkk. 2014. Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih. Dalam Republika Budaya. Vol.2.Maret.Hal 85-92
- Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi; Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno, Frans Magnis. 1999. Pemikiran Karl Marx. Jakarta: Gramedia Pu